

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Tujuan organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik serta memiliki tujuan finansial yang diorientasikan untuk memaksimalkan pelayanan publik dikarenakan memberikan pelayanan publik diperlukan dana. Akuntansi didefinisikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasikan, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. (Standar Akuntansi Pemerintahan No 71 Tahun 2010).

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi. Oleh karena itu, pengembangan teori akuntansi sektor publik sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan.

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang

mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran publik. Salah satu strategi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik membagi pekerjaan kedalam satuan kerja termasuk didalamnya adalah satuan kerja di tingkat daerah yang disebut organisasi perangkat daerah. Fenomena yang terjadi adalah masih terdapat permasalahan pada masing-masing instansi terkait dengan penggunaan anggaran diantaranya perencanaan yang kurang efektif, realisasi anggaran yang belum maksimal, kurangnya transparansi yang mengakibatkan dokumen anggaran masih susah diakses, kurangnya keterlibatan publik dan juga sangat rawan terjadi korupsi.

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan atau kejadian ekonomi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Agar laporan keuangan dapat digunakan oleh para penggunanya dalam pengambilan keputusan maka laporan keuangan tersebut harus mengandung nilai informasi yang berkualitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu dituangkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan laporan keuangan yaitu sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang pengelolaan keuangan daerah, terutama

informasi tentang status keuangan pemerintah daerah dan semua transaksi. Laporan keuangan digunakan untuk menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam urusan pemerintahan, mengevaluasi kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas entitas pelapor, dan menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah Kompetensi sumber daya manusia yang terampil. Sumber daya manusia adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Kurangnya pegawai pemerintah yang memiliki kompetensi dan juga latar belakang pendidikan di bidang akuntansi menjadi kelemahan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dengan tepat. Jadi dengan kemampuan sumber daya yang memadai maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Indriani 2019). Hal ini menunjukkan semakin baik kapasitas sumber daya manusia semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, jika tidak dilandasi dengan kompetensi yang memadai seseorang tidak akan mampu untuk mencapai kinerja tertinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi di dalam dirinya tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hal ini berlaku di setiap bidang pekerjaan, begitu juga di entitas pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas

dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Sehingga pegawai pemerintah dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi.

Selain kompetensi sumber daya manusia, hal yang paling penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas yaitu dengan menerapkan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No. 59, 2007). Penerapan sistem akuntansi daerah dilakukan dengan perubahan pencatatan *single entry* menjadi *double entry* sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Pada awalnya menggunakan pembukuan *single entry* karena dalam pengimplementasiannya mudah dan praktis, namun adanya tuntunan untuk mewujudkan *good public governance*, keadaan tersebut mengharuskan adanya perubahan pembukuan menjadi *double entry* agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan akuntabel. Dalam penelitian yang dilakukan Agustin (2020) menyatakan hasil yang positif, dapat dikatakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan penerapan

sistem akuntansi yang baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan pada suatu periode. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat.

Selain Sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia peran audit internal juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, audit internal mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu organisasi. Berdasarkan UU nomor 15 tahun 2004 yang menyatakan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan audit internal maka kualitas laporan keuangan akan meningkat. Adanya pengaruh yang positif mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah aspek pengendalian internal oleh auditor internal instansi dapat menjelaskan dan meningkatkan transparansi keuangan Pemerintah Daerah. Sebaliknya, semakin sedikit peran audit internal dapat mengurangi keterbukataan dan transparansi penelitian yang dilakukan Ali (2016).

Salah satu indikator kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini

audit atas penyajian laporan keuangan pemerintah, salah satunya adalah laporan keuangan pemerintah daerah, yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan. Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan keuangan pemerintah daerah, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 62/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah daerah kabupaten Tuban meraih opini WTP enam Kali Berturut-turut. Raihan Opini WTP ini adalah hasil kerjasama kolektif dari semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban. Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Namun jika ditemui, pemeriksa tetap mengungkapkannya dalam laporan. Sementara laporan keuangan harus memenuhi tujuh unsur

penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, seperti penelitian Agustin (2020) hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sistem akuntansi, teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia telah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Menurut penelitian Siti Zahrah *et al*, (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nadir dan Hasim (2017) yang menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Menurut penelitian Agustin (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Suhardjo (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian Pujanira dan Taman, (2017) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Andelina (2017) yang menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian Ardy dan Setyowati (2019) menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ali dan Sri (2016) yang menunjukkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

Dari latar belakang dan hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban?
3. Apakah Peran Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Tuban?

4. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
3. Untuk mengetahui Peran Audit Intenal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
4. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sumber Daya Manusia, dan Peran Audit Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak

yang membaca maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia.
2. Bagi Almamater, sebagai bahan acuan/referensi bagi yang berminat melakukan penelitian yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan daerah.
3. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tuban di waktu yang akan datang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang mengemukakan tentang gambaran/tema permasalahan yang akan dilakukan. Serta pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. Serta penelitian terdahulu yang mendukung analisis pemecahan masalah dalam

penelitian ini dan berisi kerangka konseptual yang merupakan pemikiran peneliti dari permasalahan yang di angkat oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, unit analisis tempat penelitian (Populasi/Sampel), Variabel penelitian dan definisi operasional, uji validitas dan reabilitas, alat penelitian, distribusi dan pengumpulan data, analisis data, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Bab ini merupakan landasan dalam menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi gambaran umum penelitian, hasil uji dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas serta saran – saran yang dianggap perlu dalam usaha menuju perbaikan dari kesempurnaan.